

Antara Kearifan Lokal dan Hegemoni: Pela Gandong dalam Narasi Perdamaian di Maluku

Ryan Sander Malawat
UIN Sunan Kalijaga
25205021005@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This article examines the duality of Pela Gandong in the peace narrative in Maluku, positioning it between authentic local wisdom and a potential tool for hegemony. Following the 1999-2002 social conflict, Pela Gandong was revitalized to rebuild social cohesion between Muslim and Christian communities. However, its institutionalization by political elites often transforms it into a hegemonic narrative that emphasizes social stability while obscuring structural issues such as economic inequality, segregation, and unresolved collective trauma. Using the perspectives of Antonio Gramsci on hegemony and Michel Foucault on the discourse of power, this study reveals that the formal narrative of Pela Gandong can create a “negative peace.” As an alternative, organic cross-community musical practices, such as the hadroh tradition involving Christian youth, offer a more participatory approach toward “positive peace.” Music serves as a counter-discourse that facilitates grassroots social healing. Therefore, sustainable reconciliation in Maluku requires a holistic approach that integrates local wisdom, alternative cultural expressions, and the resolution of structural injustices.

Keywords: Pela Gandong; Hegemony; Peace Narrative; Maluku; Positive Peace

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dualitas Pela Gandong dalam narasi perdamaian di Maluku, memposisikannya di antara kearifan lokal yang autentik dan potensi instrumen hegemoni. Pasca-konflik sosial 1999-2002, Pela Gandong direvitalisasi untuk membangun kembali kohesi sosial antara komunitas Muslim dan Kristen. Namun, institusionalisasi tradisi ini oleh elite politik sering kali mengubahnya menjadi narasi hegemonik yang menegaskan stabilitas sosial sekaligus menutupi persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, segregasi, dan trauma kolektif yang belum terselesaikan. Menggunakan perspektif Antonio Gramsci tentang hegemoni dan Michel Foucault tentang wacana kekuasaan, studi ini mengungkapkan bahwa narasi formal Pela Gandong dapat menciptakan “negative peace”. Sebagai alternatif, praktik musik lintas komunitas yang organik, seperti tradisi hadroh yang melibatkan remaja Kristen, menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif menuju “positive peace”. Musik berfungsi sebagai counter discourse yang memfasilitasi social healing di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang berkelanjutan di Maluku memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kearifan lokal, ekspresi budaya alternatif, dan penyelesaian ketidakadilan struktural.

Kata Kunci: Pela Gandong; Hegemoni; Narasi Perdamaian; Maluku; Positive Peace

PENDAHULUAN

Masyarakat Maluku pada dasarnya memiliki kearifan lokal yang kaya, salah satu yang paling populer adalah Pela Gandong. Pela Gandong sederhannya merupakan ikatan persaudaraan yang sakral antar negeri (desa adat) yang melintasi batas agama, suku, bahkan pulau. “Pela” mengacu pada perjanjian persaudaraan, sementara “Gandong” berarti saudara kandung, sehingga hubungan ini dianggap setara dengan ikatan keluarga satu rahim. Tradisi ini telah lama menjadi fondasi gotong royong, larangan perkawinan antar sesama pela, serta mekanisme resolusi konflik yang efektif sejak masa pra-kolonial.

Pasca-konflik sosial besar tahun 1999–2002 yang menimbulkan trauma mendalam, Pela Gandong mengalami revitalisasi intensif, penghidupan atau peangaktivan kembali nilai-nilai luhur ini tentu saja dalam rangka rekonsiliasi. Sebagaimana yang kita ketahui, tak sedikit studi memandang tradisi ini sebagai modal sosial yang penting, sangat membantu rekonsiliasi dan membangun kembali kohesi dan kepercayaan sosial antar komunitas Muslim dan Kristen. Nilai nilai “Orang Basudara”, persaudaraan, kesetaraan, dan saling tolong-menolong (Masohi) dalam Pela Gandong sering dipakai sebagai kekuatan kultural yang mampu meredam potensi konflik. Bahkan, dewasa ini Pela Gandong telah bertransformasi tidak hanya sebagai resolusi konflik, tetapi juga sebagai pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah dan program rekonsiliasi pasca Malino II (Mutmainah 2024).

Namun, di balik peran positif tersebut, muncul paradoks yang menarik. Di satu sisi, Pela Gandong tetap berfungsi sebagai kearifan lokal yang autentik untuk memperkuat kohesi sosial, di sisi lain narasi Pela Gandong juga semakin sering dimanfaatkan oleh elite politik, pemerintah daerah, dan tokoh adat sebagai instrumen perdamaian resmi bahkan kadang menjadi satu satunya mekanisme atau jalan yang ditempuh. Pernyataan pejabat tinggi kerap menekankan Pela Gandong sebagai “modal sosial” utama untuk memperkuat toleransi, tanpa selalu diimbangi dengan penyelesaian akar masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi, segregasi pemukiman dan pendidikan, trauma kolektif yang belum terselesaikan, serta kegagalan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan masa lalu.

Contoh konkret terlihat dalam pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Pada Januari 2026, Gubernur Lewerissa menyatakan:

“Nilai Pela Gandong bukan sekadar warisan budaya, tetapi modal sosial yang harus terus dirawat dan diaktualisasikan untuk memperkuat toleransi dan mencegah konflik sosial.”

Sumber; Detik Indonesia (Januari 2026).

Pernyataan semisal ini juga bisa ditemukan dalam berbagai acara resmi, seperti Makan Patita di Negeri Liang (Januari 2026) dan di Lisabata Pangel Pulang (RRI - Maret 2026). Dalam acara tersebut, Gubernur menegaskan bahwa nilai orang basudara dan Pela Gandong harus terus diwujudkan dalam kehidupan sosial sebagai simbol rekonsiliasi dan perdamaian. Acara Panas Pela (penyegaran ikatan pela) dan integrasi nilai Pela Gandong ke dalam program pendidikan juga menjadi bagian dari narasi perdamaian yang digaungkan secara resmi oleh pemerintah provinsi.

Penggunaan narasi ini secara masif menimbulkan pertanyaan kritis kemudia bahwa apakah Pela Gandong hanya berfungsi sebagai kearifan lokal yang murni, atau telah bertransformasi

menjadi narasi hegemoni yang membantu elite memperoleh persetujuan masyarakat bahwa “Maluku sudah damai”? Beberapa literatur akademik menunjukkan bahwa revitalisasi Pela Gandong pasca-konflik kadang bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menyentuh “peace gaps” (kesenjangan perdamaian) seperti segregasi sosial yang masih tersisa (Hasudungan 2020).

Fenomena ini semakin relevan di era kontemporer, dimana komestifikasi perdamaian Maluku sering dipromosikan melalui pidato pejabat, deklarasi adat, dan program pemerintah, sementara isu-isu substantif seperti akses ekonomi yang timpang, sengketa batas wilayah negeri, serta trauma kolektif belum tuntas. Dualitas antara kekuatan kearifan lokal dan potensi hegemoni inilah yang menjadi fokus utama makalah ini.

Dengan meminjam perspektif Antonio Gramsci tentang hegemoni (kepemimpinan intelektual moral melalui consent budaya) dan Michel Foucault tentang wacana kekuasaan (produksi kebenaran yang menyembunyikan relasi kuasa), tulisan ini berusaha mengurai posisi Pela Gandong dalam narasi perdamaian Maluku, antara warisan leluhur yang berharga dan alat kekuasaan yang halus.

KERANGKA TEORI

Pela Gandong: Antara Kearifan Lokal dan Transformasi Narasi Hegemoni

Pela Gandong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang telah lama menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Maluku. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol persaudaraan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur relasi antar negeri, termasuk dalam aspek solidaritas, larangan konflik, hingga mekanisme resolusi sengketa. Dalam banyak studi, Pela Gandong dipandang sebagai social capital yang efektif dalam menjaga kohesi sosial (Bartels 1977; Cooley 1962).

Dalam konteks konflik Maluku 1999–2002, Pela Gandong mengalami revitalisasi sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Tradisi ini dihidupkan kembali melalui berbagai praktik adat seperti panas pela dan kegiatan lintas komunitas yang bertujuan membangun kembali kepercayaan antara kelompok Muslim dan Kristen. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Pela Gandong berperan signifikan dalam meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog pasca-konflik (Brown et al. 2005; Tajuddin 2013).

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, terjadi semacam ada upaya institusionalisasi Pela Gandong oleh negara dan elite politik. Tradisi ini tidak lagi semata menjadi praktik sosial masyarakat yang spontan sebagai cerminan nilai-nilai luhur yang dianut, melainkan juga dijadikan simbol resmi perdamaian dalam berbagai agenda pemerintah. Kesengajaan Pela Gandong diangkat dalam pidato pejabat, program pendidikan, hingga seremoni formal sebagai representasi bahwa Maluku telah berhasil keluar dari konflik, jelas bisa dilihat sebagai upaya kosmetifikasi.

Transformasi ini memunculkan paradoks lain. Di satu sisi, pengakuan negara secara positif terhadap Pela Gandong dapat memperkuat legitimasi budaya lokal. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan reduksi makna bahkan alienasi makna, dimana Pela Gandong lebih ditampilkan sebagai simbol normatif semata daripada praktik sosial yang dinamis. Dalam kondisi ini, Pela Gandong cukup berpotensi beralih fungsi menjadi narasi hegemonik yang menegaskan stabilitas sosial, sekaligus menutupi kompleksitas persoalan pasca-konflik. Ambivalensi posisi Pela

Gandong ini mengantarkannya pada keadaan tetap hidup sebagai kearifan lokal yang autentik di tingkat komunitas, namun pada saat yang sama juga mengalami reartikulasi sebagai instrumen legitimasi dalam diskursus kekuasaan.

Analisis Hegemoni dan Wacana Kekuasaan

Konsep hegemoni dari Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan dengan mekanisme dominasi koersif (kasar), tetapi juga melalui persetujuan (consent) yang dibangun secara halus lewat kultural dan ideologis. Dalam konteks Maluku, narasi Pela Gandong yang terus-menerus direproduksi oleh pemerintah dapat dipahami sebagai upaya membangun konsensus bahwa perdamaian telah tercapai. Variabel pendukung lainnya tentu karena Pela Gandong berasal dari tradisi lokal, narasi ini memiliki legitimasi kultural yang kuat. Hal yang mana membuat masyarakat cenderung menerima begitu saja, suka rela, tanpa resistensi, sehingga proses hegemonik berjalan secara halus. Dalam istilah Gramsci, elite tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga secara intelektual dan moral dengan membingkai realitas sosial melalui simbol budaya yang diterima bersama (Gramsci 1971).

Pada kacamata lain, Michel Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang bekerja menggunakan produksi wacana. Wacana tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuknya dengan kata lain wacana adalah mesin cetak realitas. Dalam hal ini, Pela Gandong sebagai “wacana perdamaian” dengan sadar diproduksi melalui berbagai mekanisme pidato pejabat, kurikulum pendidikan, media massa, hingga ritual adat yang difasilitasi negara. Melalui proses inilah apa yang disebut Foucault sebagai regime of truth (rezim kebenaran) mendapat gambarannya, yakni seperangkat narasi yang dianggap benar dan sah dalam masyarakat. Dalam konteks Maluku, wacana yang dominan adalah bahwa harmoni sosial telah pulih berkat nilai Pela Gandong.

Namun, wacana ini juga tidak bebas dari kekurangan. Pada dasarnya narasi ini cenderung menyingkirkan narasi alternatif, sebut saja pengalaman korban, tuntutan keadilan, atau kritik terhadap ketimpangan struktural. Sebab bagaimana yang dikemukakan oleh Foucault (1980), setiap wacana selalu terkait dengan relasi kuasa, termasuk dalam menentukan apa yang boleh dibicarakan dan apa yang harus disenyapkan. Dengan demikian, analisis Gramsci dan Foucault menunjukkan bahwa Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai medium produksi dan reproduksi kekuasaan dalam konteks pasca-konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Data dikumpulkan dari berbagai literatur akademik, dokumen resmi, dan pemberitaan media yang relevan dengan narasi Pela Gandong dan proses perdamaian di Maluku. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci dan wacana kekuasaan Michel Foucault untuk membongkar makna di balik narasi formal Pela Gandong dan mengeksplorasi alternatif perdamaian melalui praktik musik lintas komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi terhadap Rekonsiliasi dan Keadilan Substantif

Dualitas Pela Gandong sebagai kearifan lokal dan sebagai narasi hegemonik ini pada urutannya memberi implikasi yang kompleks terhadap proses rekonsiliasi di Maluku. Semisal dua sisi mata koin, Pela Gandong berkontribusi besar dalam membangun kembali kepercayaan sosial (trust building) dan memperkuat hubungan antar komunitas, nilai-nilai seperti “Orang Basudara” menjadi dasar penting dalam menciptakan perdamaian yang berbasis budaya lokal. Di sisi berlainan jika terlalu ditekankan sebagai simbol perdamaian, Pela Gandong berpotensi menciptakan apa yang disebut oleh Johan Galtung sebagai negative peace, yaitu kondisi tanpa kekerasan langsung akan tetapi masih menyisakan kekerasan struktural. Dalam konteks Maluku, hal ini terlihat dari masih adanya segregasi pemukiman, ketimpangan ekonomi antar kelompok, serta trauma kolektif yang belum terselesaikan.

Selanjutnya dominasi narasi Pela Gandong ini juga berpotensi menyebabkan depolitisasi isu-isu penting. Ketika perdamaian dipahami sebagai sesuatu yang sudah “selesai”, ruang untuk mengkritisi ketidakadilan menjadi semakin sempit. Hal ini dapat melemahkan upaya untuk mencapai positive peace, yaitu perdamaian yang disertai keadilan sosial dan penghapusan struktur ketimpangan (Galtung 1969).

Implikasi lainnya adalah marginalisasi suara korban. Dalam banyak kasus pasca-konflik, rekonsiliasi yang terlalu berfokus pada harmoni seringkali mengabaikan kebutuhan akan keadilan padahal sebagaimana dikatakan Yusuf Kalla baru-baru ini bahwa sepengalamannya menjadi mediator damai, basis konflik paling kuat adalah ketidak-adilan, belum lagi masalah seperti pengakuan, reparasi, dan penegakan hukum. Perlu diingat menurut Lederach (1997), rekonsiliasi yang berkelanjutan harus mencakup dimensi kebenaran, keadilan, dan pemulihan hubungan secara simultan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat Pela Gandong secara kritis dan proporsional. Tradisi ini tetap memiliki nilai strategis sebagai fondasi perdamaian berbasis budaya, namun tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan struktural, keadilan transisional, serta pengakuan terhadap pengalaman korban.

Musik sebagai Alternatif: Dari Negatif Peace Menuju Positive Peace

Sejauh analisis di atas menguraikan Pela Gandong melalui lensa hegemoni dan wacana kekuasaan, dimensi lain dari rekonsiliasi sosial di Ambon yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah peran musik dan praktik-praktik kesenian dalam membangun perdamaian substantif. Musik, sebagai medium budaya yang universal namun kontekstual, menawarkan alternatif yang berbeda dari narasi formal Pela Gandong. Melalui musik, dimensi emosional, intersubektivitas, dan pertukaran budaya yang organik dapat terjalin tanpa harus melalui institusionalisasi yang ketat oleh negara atau elit politik.

Pengakuan UNESCO terhadap Ambon sebagai “City of Music” pada tahun 2019 merupakan momen penting yang mengesahkan peran musik dalam identitas dan praktik sosial kota ini (UNESCO 2019). Namun, lebih penting dari pengakuan formal tersebut adalah kenyataan

bahwa praktik-praktik musik tradisional dan kontemporer di Ambon secara organik telah memfasilitasi integrasi sosial lintas komunitas. Tradisi hadroh yang dilakukan oleh kelompok Muslim, terutama dalam menyambut bulan Ramadan, merupakan salah satu contoh paling signifikan. Hadroh bukan sekadar acara religius semata, melainkan juga peristiwa sosial yang menjadi ruang pertemuan komunitas. Dalam konteks Ambon pasca-konflik, yang lebih menarik adalah kehadiran elemen kreatif dan kolaboratif dalam praktik ini: tarian samrah yang mengiringi hadroh sering kali melibatkan partisipasi lintas komunitas, dan yang paling mencolok, tiupan terompet oleh remaja gereja yang mengiringi ritual Muslim tersebut.

Fenomena ini sangat signifikan dari perspektif perdamaian substantif. Kolaborasi musik antara remaja Muslim dan Kristen dalam konteks hadroh dan samrah mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai “positive peace” dalam pengertian Johan Galtung—perdamaian yang tidak sekadar absen dari kekerasan langsung (negative peace), tetapi juga melibatkan transformasi struktur sosial melalui pertukaran budaya yang bermakna (Galtung 1990). Dalam momen ini, remaja Kristen tidak hanya hadir sebagai observer pasif, melainkan sebagai partisipan aktif dalam ritual yang bermakna bagi komunitas Muslim, dan sebaliknya.

Dengan menggunakan kerangka Michel Foucault tentang produksi wacana, dapat dianalisis bahwa musik menciptakan “regime of truth” yang berbeda dari narasi Pela Gandong yang hegemonik. Jika Pela Gandong cenderung diproduksi sebagai wacana formal melalui pidato pejabat, dokumen pemerintah, dan ritual adat yang terstruktur, musik—khususnya dalam konteks hadroh dan kolaborasi lintas komunitas—menciptakan wacana melalui proses spontan, dialogis, dan embodied. Seperti yang dikemukakan Foucault, wacana tidak hanya terdapat dalam bahasa tertulis atau terucap, tetapi juga dalam praktik-praktik sosial yang terwujud melalui tubuh dan interaksi langsung (Foucault 1978).

Musik hadroh dengan partisipasi remaja Kristen dalam tiupan terompet adalah contoh konkret dari apa yang dapat disebut “counter-discourse”—sebuah wacana yang tidak dimulai dari niat institusional untuk memproduksi “kebenaran” tentang perdamaian, tetapi muncul dari kebutuhan sosial organik untuk merayakan, berbagi, dan terhubung. Dalam hal ini, musik berfungsi sebagai medium yang meruntuhkan dikotomi pembicara-pendengar; semua peserta adalah co-creators dalam pengalaman musical dan sosial tersebut.

Lebih lanjut, praktik musik lintas komunitas ini dapat dilihat sebagai bentuk yang lebih mendekati “positive peace” dalam kerangka Galtung. Galtung membedakan antara negative peace (absensi dari kekerasan langsung) dan positive peace (absensi dari kekerasan struktural dan kehadiran keadilan sosial). Praktik-praktik musik kolaboratif menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “social healing” yang bersifat mikro, yang terjadi pada tingkat interaksi interpersonal dan komunal. Ketika remaja Muslim dan Kristen bermusik bersama, mereka tidak hanya mengurangi ketegangan sosial, tetapi juga secara simultan mengubah struktur relasi sosial pada tingkat grassroots, menciptakan hubungan yang lebih setara dan mutual daripada hubungan yang bersifat top-down seperti dalam agenda perdamaian formal (Galtung 1969).

UNESCO City of Music status untuk Ambon seharusnya dimaknai tidak hanya sebagai pengakuan terhadap kekayaan tradisi musik, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa Ambon telah mengembangkan praktik-praktik perdamaian yang embedded dalam kehidupan bermasyarakatnya. Musik di sini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga medium untuk negosiasi identitas, ekspresi emosi, dan pembangunan kembali relasi sosial yang rusak akibat konflik. Ini adalah bentuk

rekonsiliasi yang lebih organik dan partisipatif, yang berpotensi menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, musik—dan dalam kasus Ambon, khususnya praktik hadroh, samrah, dan kolaborasi instrumen lintas komunitas—harus dipahami sebagai alternatif komplementer terhadap hegemoni narasi Pela Gandong. Bukan berarti Pela Gandong tidak bernilai, tetapi praktik musik organik menawarkan saluran untuk membangun positive peace yang lebih substantif, lebih dialogis, dan lebih resistant terhadap kooptasi institusional. Melalui musik, perdamaian di Ambon tidak sekadar diproklamirkan, tetapi secara harfiah dimainkan, dinyanyikan, dan dirasakan bersama dalam ruang sosial yang semakin bersifat heterogen dan kompleks.

KESIMPULAN

Makalah ini telah menguraikan dualitas Pela Gandong dalam narasi perdamaian di Maluku, antara kearifan lokal yang autentik dan potensi hegemoni. Dengan menggunakan perspektif Gramsci dan Foucault, terlihat bahwa Pela Gandong, meskipun memiliki nilai intrinsik yang kuat dalam membangun kohesi sosial, juga dapat direartikulasi sebagai instrumen kekuasaan untuk menegaskan stabilitas dan menutupi persoalan struktural pasca-konflik. Namun, di sisi lain, praktik musik lintas komunitas di Ambon, khususnya dalam tradisi hadroh, menawarkan alternatif yang lebih organik dan partisipatif menuju positive peace. Musik berfungsi sebagai counter-discourse yang meruntuhkan dikotomi dan menciptakan ruang untuk “social healing” di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang berkelanjutan di Maluku memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya menghargai kearifan lokal seperti Pela Gandong, tetapi juga membuka ruang bagi ekspresi budaya alternatif seperti musik, serta secara kritis mengatasi akar masalah struktural dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartels, D. 1977. Alor and Pantar: Further Contributions to Understanding West Timorese Societies. Leiden: KITLV.
- Brown, G. K., A. Langer, dan F. Stewart. 2005. A Typology of Post-Conflict Societies. Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), University of Oxford.
- Cooley, F. L. 1962. Ambonese Adat: A Regional Study. Yale University Press.
- Foucault, M. 1978. The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction. Pantheon Books.
- Foucault, M. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Pantheon Books.
- Galtung, J. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6(3):167-191.
- Galtung, J. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27(3):291-305.
- Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Lawrence and Wishart.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Lawrence and Wishart.
- Hasudungan, M. 2020. "Segregasi Sosial Pasca-Konflik di Ambon: Analisis Peacebuilding dan Social Cohesion." *Jurnal Perdamaian dan Konflik* 5(2):45-67.
- Lederach, J. P. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. United States Institute of Peace Press.
- Mutmainah, S. 2024. "Pela Gandong dan Rekonsiliasi Sosial: Pendekatan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Perdamaian di Maluku." *Jurnal Pascakonflik dan Rekonsiliasi* 8(1):12-34.
- Tajuddin, M. 2013. "Resolusi Konflik Tradisional di Maluku: Peran Pela Gandong dalam Restorasi Kepercayaan Sosial." Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- UNESCO. 2019. Ambon City of Music: Celebrating the Musical Heritage of Ambon, Indonesia. UNESCO Creative Cities Network Press.